

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden). Dalam studi pelaksanaan publik, dikatakan implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu , implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses pelaksanaan

Olahraga termasuk salah satu aktivitas yang sangat penting bagi tubuh. Banyak manfaat yang dihasilkan dengan berolahraga secara teratur. Selain untuk menjaga kebugaran fisik seseorang, olahraga juga dipercaya membangun semangat untuk menjalani hari-hari yang sibuk. Menyediakan satu atau dua jam saja waktu untuk berolahraga bisa memberikan banyak manfaat, tak hanya fisik tapi juga mental. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam pasal 1, Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan; Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga; Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Penyelenggaraan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, holistik, dan berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional sebagai strategi nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi

penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Organisasi keolahragaan harus berbadan hukum tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi harus dipahami sebagai strategi nasional untuk mengembangkan organisasi keolahragaan nasional yang memiliki manajemen pengorganisasian yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkannya dalam membina kerjasama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan pemerintah daerah maupun antar sesama organisasi olahraga.

Menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2007 mengatakan bahwa segala sumber pengelolaan dan biaya pemeliharaan sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 yang dimana biaya yang didapat harus disesuaikan dengan kebutuhan. Maka biaya yang sudah ada harusnya bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mengelola sarana dan prasarana yang selayaknya itu hak masyarakat, ketegasan ini juga perlu diperbaiki dalam penyaluran dana artinya apakah dana ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Dalam Peraturan No 7 tahun 2007 juga disampaikan bahwa segala sarana dan prasarana olahraga perlu dikelola melalui manajemen dan operasional dengan baik untuk pengembangan sehingga dapat berfungsi dengan baik.

Sarana prasarana olahraga yang ada didambakan untuk bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat bisa dimanfaatkan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Sedangkan pada saat ini ketika orang singgah atau melakukan

aktivitas baik itu olahraga berat hingga ringan bersama keluarga atau sendiri merasa tidak nyaman akan keadaan atau kondisi yang ada di stadion atau lapangan yang merupakan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk umum bisa dimanfaatkan secara baik. Berbagai masalah pun muncul dalam pengelolaan sarana olahraga sepak bola kota Cirebon kurangnya peran dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan fasilitas dan pembiayaan dalam pengembangan suatu olahraga, pengelolaan sarana prasarana olahraga sepak bola yang ada tidak sesuai dalam artian bahwa distadion tersebut kondisinya tidak baik bahkan disalah gunakan oleh masyarakat atas fungsinya. Seperti pada halnya ketika sebuah lapangan sepak bola digunakan untuk melakukan latihan mobil atau motor.

Bahkan lapangan rumput yang hijau menjadi lapangan rumput tidak semestinya yang harusnya digunakan untuk sepak bola dialih fungsikan menjadi tempat lapangan tersebut. Bahkan area sarana prasarana olahraga yang sudah disediakan menjadi kumuh akibat banyak orang yang tidak tertib akan peraturan . Belum lagi banyaknya pedagang yang semakin memenuhi lapangan sehingga mempersempit ruang gerak untuk masyarakat melakukan kegiatan lari atau olahraga ringan lainnya .Harusnya pemerintah bisa tegasakan hal ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat di berikan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: implementasi kebijakan dalam pengelolaan sarana olahraga di kota cirebon (studi kasus sarana olahraga sepak bola di dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kota cirebon) belum efektif .

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan untuk mempermudah pembahasan yang dilakukan, peneliti mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam pengelolaan sarana olahraga di Kota Cirebon?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan dalam pengelolaan sarana olahraga di Kota Cirebon?
3. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan sarana olahraga di Kota Cirebon ?

1.4. Tujuan Penelitian

berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam pengelolaan sarana olahraga di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan dalam pengelolaan sarana olahraga di Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan sarana olahraga di Kota Cirebon.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis,
 - a. Yaitu kegunaan penelitian untuk memperkaya literatur dan untuk pengembangan ilmu yang ditekuni peneliti dalam hal ini Ilmu administrasi negara khusus yang terkait dengan teori evaluasi.
 - b. Sebagai pengabdian di bidang ilmu pengetahuan secara konkrit yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis,
 - a. Yaitu kegunaan penelitian untuk Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan yang secara praktis dan bermanfaat bagi lembaga, instansi pemerintah, maupun swasta yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang hal itu.

- b. Sebagai pengabdian di bidang ilmu pengetahuan secara konkrit sehingga dapat dimanfaatkan oleh suatu instansi atau perusahaan .

1.6. Kerangka Pemikiran

Menurut Winarno (2014:146), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditunjukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa bisa dijalankan. Implementasi bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungannya, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014:149), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

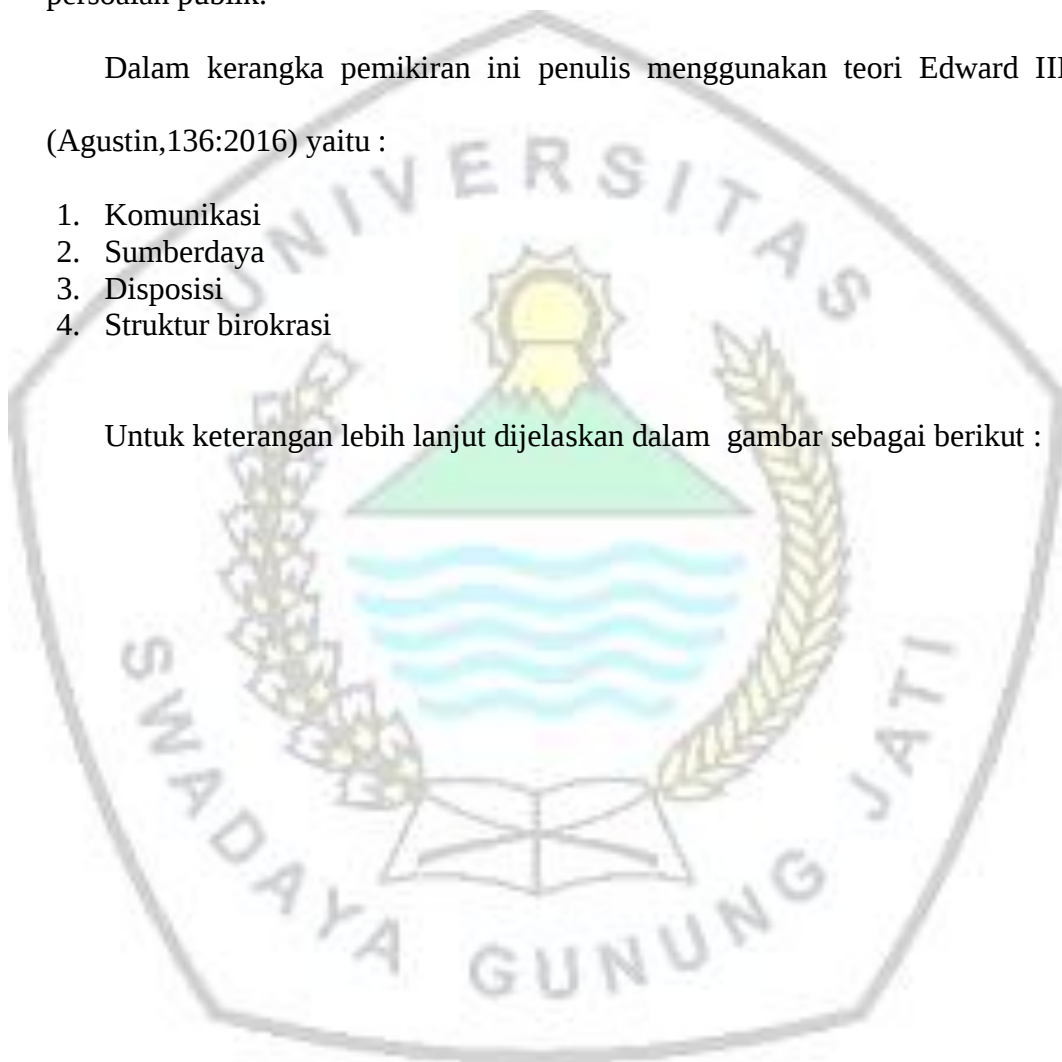


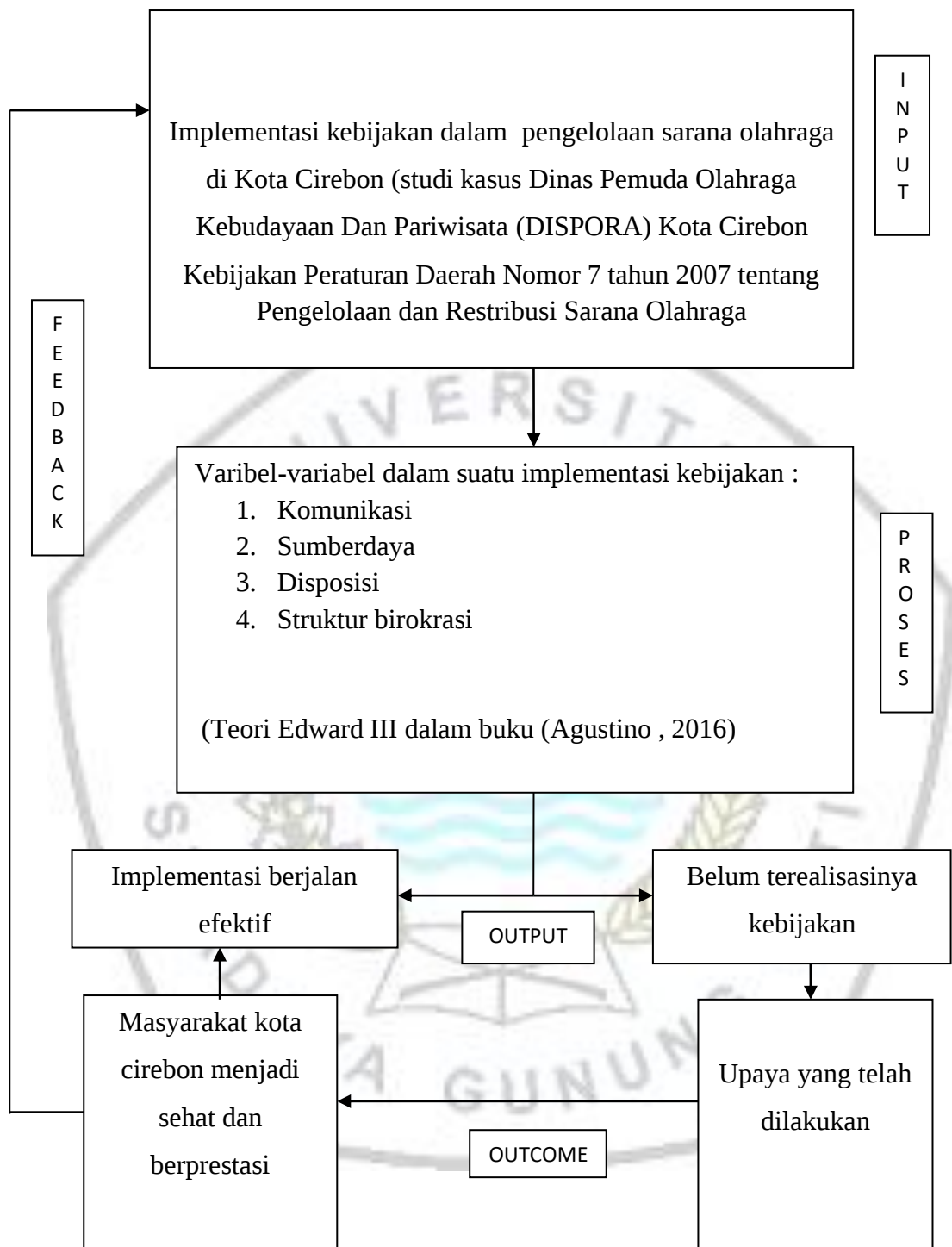
Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Dalam kerangka pemikiran ini penulis menggunakan teori Edward III (Agustin,136:2016) yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Untuk keterangan lebih lanjut dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :





Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7. Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1. Definisi Konsep Penelitian

Menurut Winarno (2014:146), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditunjukkan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungannya, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Menurut Ripley dan Franklin (winarno, 2014:148), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud

tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Sementara itu Grindle (winarno, 2014:149), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencangkup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankandengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik – pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tyjuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah kedalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakanm suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top-down* dikembangkan oleh Edward III (Agustino, 2016:136) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan ini Edward III terdapat empat variabel

yang sangat menentukan keberhasilan implementasi. Suatu kebijakan yaitu komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Sedangkan menurut Grindle (dalam jurnal yang ditulis oleh Imronah dengan judul Implementasi kebijakan) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014:149), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variable yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance). Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, kita mempunyai harapan yang besar menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variable bebas dan variable terikat dalam suatu cara yang semena-mena.

Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Edward III sebagai berikut :

Tabel 1.1

1.7.2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan Edward III (Agustin, 2016:136)	Komunikasi	1. Transmisi kebijakan pengelolaan sarana olahraga 2. Kejelasan informasi dalam pengelolaan sarana olahraga 3. Konsistensi kebijakan pengelolaan sarana olahraga
	Sumberdaya	1. Staf pelaksana pengelolaan sarana olahraga 2. Informasi dalam kebijakan pengelolaan sarana olahraga 3. Wewenang dalam pengelolaan sarana

		olahraga 4. Fasilitas dalam pengelolaan sarana olahraga
	Disposisi	1. Kepatuhan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana olahraga 2. Insentif dalam pengelolaan sarana olahraga
	Struktur birokrasi	1. Standard operating procedurs (SOP) dalam pengelolaan sarana olahraga 2. faragmanetasi (penyebaran tanggung jawab) dalam pengelolaan sarana olahraga

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, Sugiyono (2012:1) mengemukakan bahwa, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara

yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, empiris berarti cara yang dilakukan itu diamati oleh indraw manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan, sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Artinya data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Peneliti menganalisis data data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2010) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan

sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan pengertian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Digunakan

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian yang dilakukan bukan untuk mencari hubungan antar variabel, akan tetapi penelitian dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan dan memaparkan tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan sarana olahraga di kota Cirebon (studi kasus sarana olahraga sepak bola di dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kota Cirebon)

Sampel atau informan yang dilibatkan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Disamping itu pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditentukan dari subjek lainnya.

Teknik pengambilan informan yaitu dengan cara Purposive Sampling artinya pengambilan sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Informan Kunci (Key Informan) yaitu informasi yang didapat langsung dari narasumber atau objek yang diteliti, yaitu :
 1. Kepala bidang keolahragaan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Cirebon.
 2. Kepala seksi bidang Organisasi Prestasi & Relkreasi di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Cirebon.
 3. Pelatih Perserikatan Sepak Bola Indonesia (PSIT) Cirebon.
- b. Informan pendukung yaitu informan yang di dapat dari :
 1. Pegawai Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Cirebon.
 2. Pengelola stadion Bima Kota Cirebon.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Sugiyono (2012:225) mengemukakan bahwa :

"Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi".

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi :

a. Studi kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dua teknik yaitu:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan key informan (informan kunci) yaitu :

- a. Kepala bidang keolahragaan Di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Cirebon.

b. Kepala seksi bidang Organisasi Prestasi & Relkreasi di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Cirebon.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.
3. Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu pencarian, penyelidikan,

pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen.

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menghindari adanya penelitian yang bias, maka diperlukan uji absahan data. Keabsahan data harus dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Sugiyono (2012:270), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi : uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).

penulis melakukan keabsahan data dengan melakukan triangulasi (dalam Moleong, 2010:330). Alasan penulis melakukan teknik triangulation adalah dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada didalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *merecheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan :

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Pengecekan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan valid, maka dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada informasi yang berbeda terhadap data maupun informan dari hasil wawancara.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Teknik analisis data deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan sebenarnya objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian. Jadi penelitian ini dapat menggambarkan implementasi kebijakan dalam pengelolaan sarana olahraga di Kota Cirebon.

McDrury, 1998 (dalam Moeleong 2010: 248), mengemukakan tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data
3. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.

1.9. Lokasi dan Rencana Jadwal Penelitian

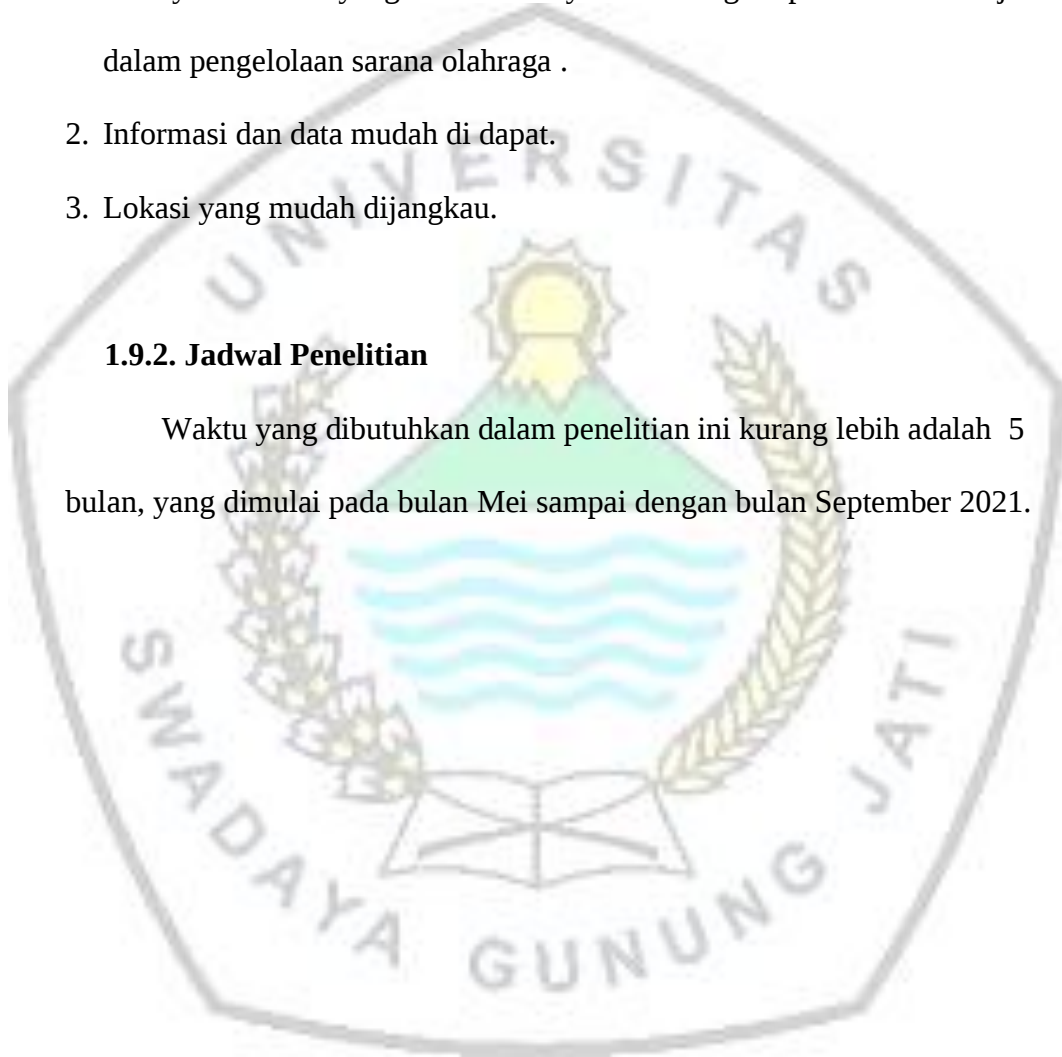
1.9.1. Lokasi Penelitian

Alasan-alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya masalah yang ditemukan yaitu tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan sarana olahraga .
2. Informasi dan data mudah di dapat.
3. Lokasi yang mudah dijangkau.

1.9.2. Jadwal Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih adalah 5 bulan, yang dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan September 2021.



Jadwal Penelitian

[illegible]